

Guru Besar Sosiologi Hukum, Satjipto Rahardjo, pernah mengatakan bahwa jaksa, hakim, dan pengacara merupakan sosok penegak hukum gedongan.

SEDANGKAN Polisi adalah penegak hukum jalanan, karena aktivitas kerjanya dapat dipantau publik, tersaji begitu terang, dan terbuka. Ancaman dan persoalan hukum yang dihadapi Polisi di lapangan, tak selamanya persis seperti teori buku. Itu sebabnya, Polisi butuh pragmatisme hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, bahkan diberi wewenang melakukan diskresi.

Sebagai parameter kebijakan, diskresi Kepolisian dapat menyeimbangkan dua kepentingan yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Hanya saja, penilaian terhadap keadilan, antara penafsiran Negara dan masyarakat, kadang lebih banyak unsur subyektifnya. Sementara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bisa lebih efektif jika masyarakat ikut berpartisipasi. Memadukan keduanya, bukan pekerjaan gampang. Karena saat Polisi menjalankan tugas pelayanan, umumnya kepentingan Negara tidak terlecehkan.

Tidak mudah menegakkan hukum pada masyarakat yang begitu kompleks, apalagi disertai upaya paksa. Di dalamnya terkait dengan kristalisasi kepentingan Negara yang cenderung homogen, bahkan bisa mengabaikan kepentingan masyarakat. Ini yang memaksa Polisi mengikuti aturan main. Begitu pula, saat Polisi memberikan perlindungan dan pelayanan publik, sering tidak sejalan dengan kepentingan penegakan hukum, karena kepentingan masyarakat lebih bersifat heterogen, yang memaksa Polisi

Polisi, Profesi Rumit dan Unik

Oleh : Marwan Mas

Pengamat Hukum



menentukan pilihan. Itulah yang membuat profesi Polisi di era peradaban modern begitu berat dan rumit. Polisi harus berada selangkah di depan masyarakatnya. Persoalan ada oknum Polisi nakal atau buruk dalam bertugas, itu masalah lain. Sebaik apapun sebuah profesi, selalu saja ada yang menyimpang, ada yang berbuat culas yang dapat menjatuhkan citra institusi.

Bagi Polisi, ada ungkapan "*kaki kanan di kuburan, kaki kirinya di penjara*". Lambat mengambil keputusan, siap-siaplah menjadi korban. Atau tugas gagal sehingga korban jatuh dari kalangan masyarakat. Tapi terlalu cepat bertindak yang kemudian

keliru, sudah pasti berisiko sehingga Polisi bersangkutan bisa meringkuk di penjara.

Watak sipil

Untuk mewujudkan Polisi berwatak sipil dalam memberikan pelayanan dan pengayoman, dituntut memegang prinsip "seyum, sapa, dan salam". Bahkan harus anti kekerasan yang illegal. Ini salah satu yang menunjukkan betapa unik dan rumitnya profesi Polisi. Keunikan lainnya, setiap anggotanya berwenang mengambil keputusan sendiri yang tidak boleh ditunda-tunda, karena persoalan kecil bisa menjadi besar. Seorang Polisi harus mengambil keputusan sendiri, bertindak sen-

diri, tetapi harus tetap dalam bingkai hukum.

Seorang jaksa punya waktu yang luang mempelajari perkara sebelum melakukan penuntutan. Hakim selalu ada dalam ruang dan waktu yang cukup panjang untuk memeriksa dan memutuskan sebuah perkara. Begitu pula pengacara, cukup waktu mempelajari perkara untuk membela kliennya.

Dalam hal tertentu, Polisi bisa saja seorang diri menghadapi masalah Kamtibmas yang butuh pengambilan keputusan cepat. Misalnya ketika seorang anggota Polisi berada di pertokoan, tiba-tiba ada yang berteriak kecopetan atau disandera penjahat. Dalam kondisi demikian, dia harus segera bertindak, tanpa harus berembuk atau meminta pendapat atasannya. Waktu antara pengambilan keputusan dan harus bertindak begitu sempit.

Jika tak segera bertindak, penjahatnya sudah pasti kabur atau akan ada korban jatuh. Polisi harus mampu mengungkap kejahatan yang kadang seperti mengarang hutan belantara. Polisi

harus membuat terang semua peristiwa kejahatan agar dapat dituntut dan dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Banyak yang simpati pada pekerjaan Polisi, tapi lebih banyak yang mencemooh. Ironisnya, meski tugasnya berat, hasil kerjanya amat jarang mendapat ucapan terima kasih dari masyarakat. Kalaupun ada pujian yang dimuat di media, tak lebih dari hitungan jari satu tangan dan cepat hilang ditelan dinamika dan perubahan masyarakat. Ibarat pepatah, "*jasa tak berhimpun dosa tak berampun*".

Kekerasan

Tak jarang kekerasan mewarnai kehidupan Polisi. Dia bisa berasal dari masyarakat umum yang dilindungi, maupun masyarakat penjahat yang diperangi. Tidak terbilang Polisi didamprat anggota masyarakat karena mencoba bersikap tegas. Polisi juga kerap menjadi korban kekerasan saat mengejar dan menangkap penjahat, termasuk saat mengamankan aksi unjuk rasa. Rasa tidak senang, paling

sering dialami aparat Kepolisian. Pola senang atau tidak senang dapat sangat dipengaruhi oleh **image** masyarakat **image** Polisi rusak, butuh waktu lama memulihkannya. Tapi Polisi harus mampu menyadarkan warga masyarakat bahwa pelayanan dan perlindungan yang diberikannya tidak harus didasarkan pada senang dan tidak senang, melainkan pada profesionalitas. Masyarakat boleh saja mengembangkan pola senang atau tidak senang terhadap kinerja Polisi, tetapi pelayanan Polisi hendaknya tidak dipolakan seperti itu.

Kendati profesionalitas bukan tujuan pokok, tapi ia sangat mendasar dalam memantapkan tugas-tugas Polisi. Profesionalisme penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum. Pada Kepolisian di dunia manapun, profesionalisme selalu dijadikan standar untuk membangun citra yang baik agar dipercaya rakyat.

Hampir setiap konferensi Kepolisian Internasional selalu membicarakan dan memperdebatkan bagaimana menata dan meningkatkan kualitas profesionalisme Polisi. Citra yang baik, profesionalisme, dan kemandirian, memang menjadi modal besar agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari Polisi. Tapi upaya membangun citra dan profesionalisme tidak akan pernah mencapai hasil maksimal bila tidak disertai aksi konkret di lapangan, termasuk dukungan masyarakat akan **m e m p e r e r a t** hubungan diametral yang berguna bagi tumbuhnya rasa aman dan penghormatan pada hukum sebagai kebutuhan riil masyarakat.*.*.*

